LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROV. JAWA TENGAH
TAHUN 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Jateng telah selesai. LKj-IP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Prov Jateng dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Prov Jateng diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKj-IP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

KALAKHAR BPBD PROV JAWA TENGAH

Drs. SUDARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600512 198903 1 012

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Gambaran Umum Organisasi 5

1. Tugas Pokok dan Fungsi 5

2. Sumberdaya 11

B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah 21

1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018 21

2. Misi 21

3. Tujuan 22

4. Sasaran 22

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi 23

BAB II PERJANJIAN KINERJA 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 27

A. Capaian Kinerja Organisasi 27

1. Sasaran Strategis 1 28

2. Sasaran strategis 2 34

3. Sasaran Strategis 3 37

4. Sasaran strategis 4 40

5. Sasaran Strategis 5 41

B. Realisasi Anggaran 47

BAB IV P E N U T U P 50

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan 50

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 9
Tabel 2 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah 11
Tabel 3 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah 12
Tabel 4 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah 12
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2018 14
Tabel 6 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2018 15
Tabel 7 Penetapan Kinerja TA 2018 25
Tabel 8 Skala Pengukuran Kinerja 28
Tabel 9 Perhitungan Kinerja Sasaran 1 28
Tabel 10 Perhitungan Kinerja Sasaran 2 36
Tabel 11 Perhitungan Kinerja Sasaran 3 39
Tabel 12 Perhitungan Kinerja Sasaran 4 40
Tabel 13 Perhitungan Kinerja Sasaran 5 41
Tabel 14 Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2018 43
Tabel 15 Pengukuran Pencapaian Sasaran 44
Tabel 16 Realisasi Keuangan APBD TA 2018 47
Tabel 17 Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2018 49

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Jawa Tengah mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan

bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya undang-undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Implementasi dari pelaksanaan UU 23 tahun 2014 adalah pada tahun 2016 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk perangkat daerah yang menangani bencana yaitu BPBD Provinsi akan diatur sebagaimana amanat PP No.18 tahun 2016. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu tupoksi terkait penangana kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008. Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekon-struksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karaktersitik wilayah yang cukup kompleks Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana social, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Jateng tersebar secara merata di seluruh wilayah.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana dan kajian rawan bencana sejak tahun 2011 (kajian rawan bencana) dan 2013 kajian risiko bencana. Risiko bencana sebagai fungsi dari interaksi antara

bahaya (ancaman), kerentanan dan kapasitas bersifat dinamis. Mendasarkan hasil dua kajian tersebut, posisi Provinsi Jawa Tengah menalami penurunan peringkat Jawa Tengah pada kategori rawan dan risiko bencana, yaitu peringkat nasional risiko bencana 13 sedangkan pada peringkat rawan nomor urut 1. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 2011 – 2013 telah memberikan dampak sehingga meskipun tingkat kerawanan tinggi namun risiko bencana dapat dikurangi. Upaya-upaya penanggulangan bencana terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, mendasarkan hasil kajian BNPB tahun 2013, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota risiko tinggi, dan 13 Kabupaten/Kota lainnya termasuk risiko sedang. Hasil tersebut didasarkan pada perhitungan indeks risiko bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang kajian risiko bencana. Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multihazard), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks rawan dan risiko bencana di 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah adalah tabel berikut.

Tabel 1
Indeks Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko 2013				Indeks Rawan 2011			
		Skor	Kelas	Rangking Prov	Rangking Nas	Skor	Kelas	Rangking Prov	Rangking Nas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cilacap	132	Tinggi	1	3	215	Tinggi	1	17
2	Banyumas	123	Tinggi	5	8	207	Tinggi	2	36
3	Purbalingga	62	Tinggi	17	192	159	Tinggi	28	226
4	Banjarnegara	75	Tinggi	19	127	150	Tinggi	23	289
5	Kebumen	113	Tinggi	7	12	203	Tinggi	3	49
6	Purworejo	91	Tinggi	2	46	215	Tinggi	13	18
7	Wonosobo	105	Tinggi	27	20	135	Sedang	5	358
8	Magelang	94	Tinggi	23	42	143	Sedang	11	326
9	Boyolali	92	Tinggi	18	43	159	Tinggi	12	227
10	Klaten	106	Tinggi	30	19	123	Sedang	4	414
11	Sukoharjo	82	Tinggi	33	76	93	Sedang	16	482
12	Wonogiri	89	Tinggi	22	55	146	Tinggi	14	313
13	Karanganyar	102	Tinggi	29	24	130	Sedang	8	388
14	Sragen	76	Tinggi	26	118	142	Sedang	21	334
15	Grobogan	75	Tinggi	16	126	162	Tinggi	22	220
16	Blora	58	Tinggi	20	222	150	Tinggi	31	290
17	Rembang	77	Tinggi	12	107	172	Tinggi	19	164
18	Pati	98	Tinggi	11	31	174	Tinggi	10	153
19	Kudus	78	Tinggi	28	103	132	Sedang	18	378
20	Jepara	105	Tinggi	15	21	163	Tinggi	6	209
21	Demak	69	Tinggi	8	153	184	Tinggi	26	95
22	Semarang	103	Tinggi	24	23	143	Sedang	7	327
23	Temanggung	70	Tinggi	25	149	143	Sedang	25	328
24	Kendal	73	Tinggi	14	139	167	Tinggi	24	190
25	Batang	62	Tinggi	13	193	168	Tinggi	29	175
26	Pekalongan	76	Tinggi	10	116	183	Tinggi	20	97
27	Pemalang	78	Tinggi	6	101	206	Tinggi	17	37
28	Tegal	64	Tinggi	3	180	213	Tinggi	27	26
29	Brebes	101	Tinggi	4	25	211	Tinggi	9	29
30	Kota Magelang	44	Tinggi	32	343	108	Sedang	34	459
31	Kota Surakarta	60	Tinggi	35	207	80	Sedang	30	490
32	Kota Salatiga	34	Sedang	34	404	91	Sedang	35	485
33	Kota Semarang	87	Tinggi	9	60	184	Tinggi	15	96
34	Kota Pekalongan	52	Tinggi	21	272	148	Tinggi	32	306
35	Kota Tegal	46	Tinggi	31	322	117	Sedang	33	441

Sumber : BNPB

Mendasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya kerawanan bencana akan semakin berkurang bahayanya jika ada upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan peningkatan kapasitas masyarakat maupun penurunan tingkat kerentanan. Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indicator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya

   Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

2. Mengurangi kerentanan

   Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

   Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah

dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

BPBD Jawa Tengah telah mencermati dan menindaklanjuti dengan mengumpulkan data daerah rawan bencana yang meliputi wilayah desa /kelurahan, kecamatan dan warga terdampak. Data daerah rawan bencana Jawa Tengah adalah sebagaimana pada table berikut.

Tabel 2
Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No	Bencana	Kab		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjir	32	91,42	314	54.8	1.776	20,7	772.177	8,0
2	Longsor	29	82,85	342	59.7	2.331	27.2	642.001	6,6
3	Kekeringan	27	77,14	235	41	1.443	16.8	677.952	7.0
4	Angin puting beliung	12	42,85	132	23.0	752	8,8	282.212	2,9
5	Gempabumi	14	37,14	116	20.2	1.514	17,6	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung api	11	31,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7

2. Sumberdaya

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Pengingkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir						
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PNS	40	8	20	10	2	10	5	1	48
2	Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Harian Lepas	17	7	1	16	2	5	-	-	24
	b. Outsourcing	57	15	21	31	4	15	5	1	72
	Total	40	8	20	10	2	10	5	1	48

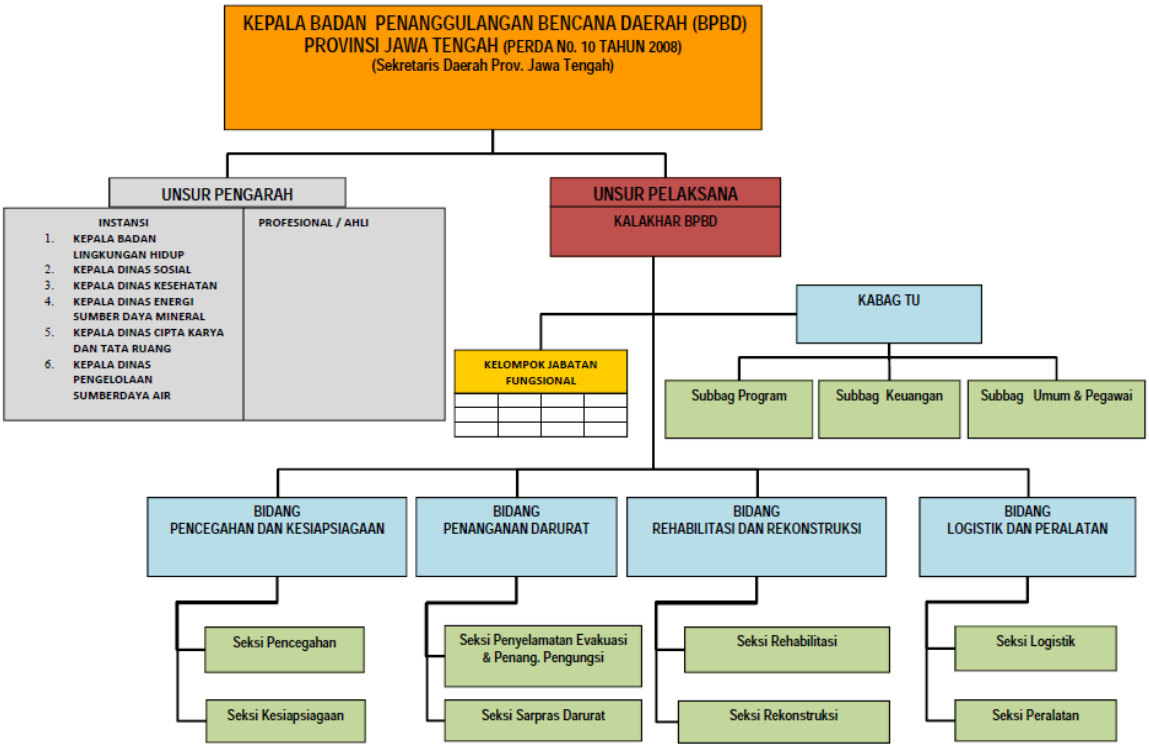
Sumber: Data Pegawai BPBD s.d Desember 2018

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol		Jumlah	
1	2		3	
1	**Golongan IV**	**:**	**11**	**orang**
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	1	orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	-	orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	:	3	orang
c	Pembina (IV/a)	:	7	orang
2	**Golongan III**		**24**	**orang**
a	Penata Tk I (III/d)	:	9	orang
b	Penata (III/c)	:	8	orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	:	5	orang
d	Penata Muda (III/a)	:	2	orang
3	**Golongan II**		**12**	**orang**
a	Pengatur Tk I (II/d)	:	1	orang
b	Pengatur (II/c)	:	7	orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	:		orang
d	Pengatur Muda (II/a)	:	4	orang
4	**Golongan I**		**2**	**orang**
a	Juru Tk I (I/d)	:	1	orang
b	Juru (I/c)	:	1	orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	:	-	orang
d	Juru Muda (I/a)	:		orang
	JUMLAH	**:**	**48**	**orang**

Secara struktur organisasi, kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan beberapa peralatan baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2018

No	Nama Bidang	31 Des 2017		31 Des 2018	
		Jmlh	Harga (Rp)	Jmlh	Harga (Rp)
1	2	3	4		
1	**Tanah**	**2**	**3.100.000.000**	**2**	**3.100.000.000**
	Tanah	2	3.100.000.000	2	3.100.000.000
2	**Peralatan Dan Mesin**				
	Alat-alat besar	35	2.972.653.000	35	2.972.653.000
	Alat-alat Angkutan	114	12.503.679.043	125	13.497.962.543
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6	309.100.000	6	309.100.000
	Alat-alat Pertanian / Peternakan				
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.104	5.883.017.901	2.281	6.227.208.971
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	576	1.625.556.949	576	1.625.556.949
	Alat-alat Kedokteran				
	Alat-alat Laboratorium				
	Alat-alat Keamanan	294	1.563.276.003	294	1.563.276.003
	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur				
	Alat Olah Raga				
3	**Gedung Dan Bangunan**	3	6.877.783.968	3	6.877.783.968
	Bangunan Gedung	3	6.877.783.968	3	6.877.783.968
4	**JALAN, DAN IRIGASI**				
	Jalan dan Jembatan				
	Bangunan Air / Irigasi	7	89.000.000	7	89.000.000
	Instalasi	1	91.433.000	1	91.433.000
	Jaringan				
5	**ASET TETAP LAINNYA**				
	Buku Perpustakaan	484	53.422.955	484	53.422.955
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	7	875.000	7	875.000
	Hewan Ternak dan Tumbuhan				
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**				
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	JUMLAH	3.640	35.187.864.885	3.877	39.475.639.389

Sedangkan sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu seperti kendaraan dengan fungsi khusus, seperti kendaraan trasnportasi, komunikasi, peralatan/perlengkapan evakuasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2018

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
I	01	Alat Transportasi		
		1	Mobil Ambulance	3
		2	Mobil Tangki BBM	
		3	Mobil Evakuasi	
		4	Mobil Pemadam Kebakaran	
		5	Helikopter	
		6	Mobil Komando	1
		7	Mobil Patroli	
		8	Mobil Jelajah	
		9	Mobil Operasional	9
		10	Mobil Komunikasi	1
		11	Mobil Rescue	8
		12	Motor Ops	14
		13	Motor Trail	12
		14	Mobil Jenazah	1
		15	Mobil Box	2
		16	Pick Up	1
		17	Mobil Logpal	1
		18	Truk Serbaguna	1
		19	Mobil Dapur Lapangan	1
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	5
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	1
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	
		26	Mini Bus	1
		27	Mobil Klik	
			Jumlah	67
II	**02**	**Alat Komunikasi dan Informasi**		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	
		2	Portable Communication Mobile	

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		3	HT	21
		4	RIG	6
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Perngatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	**51**
III	**03**	**Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi**		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		11	Trailer	2
		12	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		13	Mesin Perahu 40 PK	5
		14	Mesin Perahu 25 PK	5
		15	Mesin Perahu 18 PK	5
		16	Mesin Perahu 15 PK	1
		17	Dolphin / speed boat	2
		18	Peralatan Selam	7
		19	Vertical Rescue	6
		20	Teropong / Teleskop	4
		21	Chain Saw	6
		22	Helm SAR	4
		23	Pulay	10
		24	Breathing Appars	2

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		25	Life Detector	
		26	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		27	Pakaian Tahan Panas	2
		28	Pompa Perahu	14
		29	Rak Tempat Perahu Karet	5
		30	Selang BBM	14
		31	Sandaran Mesin Tempel	4
		32	Perahu Alumunium	
		33	Jangkar	
		34	Ring Buoy	
		35	Tali PP 10 mm	
		36	Tangki BBM	14
		37	Dayung	20
		38	Pakaian Tahan Api	
		39	Helm Tahan Panas	
		40	Sepatu	
		41	Sarung Tangan	
		42	Helm Biasa	
		43	Perahu Kayu	2
		44	Bidai Spinal	2
		45	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	**222**
IV	**04**	**Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar**		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	**316**
V	**05**	**Alat Berat**		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
			Jumlah	-
VI	**06**	**Alat Penerangan dan Kelistrikan**		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6
			Jumlah	
VII	**7**	**Alat Pergudangan**		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
			Jumlah	**105**
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirgen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
			Jumlah	6
			Jumlah Total	880

Sumber : Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah s.d Desember 2018 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Prov Jateng

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sebagai *leading sector* sebagaimana amanat Perda 11 tahun 2009. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi meliputi tiga yaitu: pra, saat dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD Prov Jawa Tengah bertanggungjawab dalam tiga tugas utama, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Sebagai pelaksana, BPBD wajib untuk memberikan perlindungan dan penanggulangan bencana, sedangkan fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando/perintah kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, sedangkan fungsi koordinasi dilaksanakan untuk mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana agar terstruktur, terencana dan sinergi.

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov Jawa Tengah dioptimalkan untuk penanganan bencana terutama pada tahapan pra bencana. Pada tahapan ini, kegiatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, perencanaan, dan peringatan dini (*early warning*) mempunyai nilai strategis yang dapat menentukan kegiatan pada saat tahap darurat. Tahap saat bencana (tanggap darurat) merupakan tahap yang sangat krusial. Pada tahap ini kegiatan penanggulangan bencana bertumpu pada upaya penyelamatan, evakuasi, dan penanganan permasalahan pengungsian (jika ada). Pengungsian ini menjadi salah satu isu penting karena dampak bencana menyebabkan kerusakan tempat tinggal sehingga masyarakat terdampak memerlukan tempat hunian. Tindakaan saat

darurat akan disusul dengan fase transisi dan kemudian tahapan pasca bencana (tahap pemulihan). Tahapan ini terdiri dari dua prioritas, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip dasar dari fase pemulihan ini adalah untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman.

Mendasarkan pada paradigma penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana, maka upaya-upaya pada pra bencana (tidak terjadi bencana ataupun terdapat potensi terjadi bencana) menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penanganan saat bencana. Upaya yang dilakukan pada fase pra bencana menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam penanggulangan bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen pemangku kepentingan baik tingkat pemerintahan, lembaga usaha dan juga masyarakat. Komitmen yang kuat untuk mengurangi risiko bencana sangat diperlukan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi stretegis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana.

Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Visi Jawa Tengah 2013 - 2018

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "*Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi*".

2. Misi

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

3. Tujuan

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana

4. Sasaran

a. Tersusunnya Peraturan /Pedoman/SOP bidang Kebencanaan;
b. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
c. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
d. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
f. Meningkatkan kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu disikapi dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan PB secara meyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Kelembagaan BPBD di kabupaten/kota belum terbentuk 100%. Terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasar Peraturan daerah, yaitu Kota Magelang, dan kota Salatiga
2. Belum seluruh BPBD Kabupaten/Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. Terdapat 16 kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga rasio dana PB dengan APBD Kabupaten/Kota belum ideal
4. Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang ideal untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusdalops
5. Kapasitas sumberdaya manusia di BPBD sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas
6. Penyediaan Logistik dan peralatan PB belum ideal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah yang harus disediakan dengan yang dimiliki
7. Kerjasama penanggulangan bencana meliputi kerjasama dengan Dunia usaha, media massa, maupun penggiat PB masih perlu terus ditingkatkan.
8. Dunia usaha di Jateng sangat besar dan sangat potensial untuk ikut serta dalam PB melalui CSR
9. Penataan kelembagaan BPBD di daerah masih perlu diperkuat melalui peraturan sesuai dengan amanat undang-undang yang bersifat teknis maupun administrative pemerintahan

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Gubernur dengan Kepala Pelaksana BPBD Prov Jawa Tengah. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Jawa Tengah selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala

Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Secara singkat keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Penetapan Kinerja TA 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3
Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana	8
	Jumlah unit EWS terpasang	8
	Jumlah kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana	3
	Jumlah rambu Jalur Evakuasi terpasang	150
	Jumlah kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen bidang kebencanaan	3
	Jumlah peserta/ komunitas PB yang terlibat dalam upaya PRB	4.000
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Jumlah peserta bintek SAR dan latihan gabungan	200
	Jumlah peserta pelatihan TRC	90
	Jumlah tangki bantuan air bersih	1000
Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta pelatihan DALa/ Jitu Pasna	50
	Jumlah koordinasi dan konsolidasi rehab rekon	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana	Jumlah paket logistik untuk masyarakat terdampak bencana	1.300

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3
peralatan dan logistik bencana	Jumlah unit peralatan sarana prasarana PB	5
Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah publikasi kebencanaan dan even pengurangan risiko bencana/ pembangunan	150
	Jumlah data kejadian kerusakan/ kerugian bencana	1
	Jumlah peserta kursus/diklat teknis dan pendukung PB	350
	Jumlah kegiatan koordinasi konsolidasi lintas sekor wilayah para pemangku kepentingan PB	8

BPBD Prov Jawa Tengah telah melaksanakan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah dengan melaksanakan telah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang didukung oleh APBD Prov Jawa Tengah sebesar Rp. 29.608.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel.

Kinerja *(performance)* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 8
Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 (Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana), keberhasilannya diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu tersusunnya pedoman bidang penanggulangan bencana dan terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan daerah. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 9
Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Thn 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana	8	8	100	68	100
	Jumlah unit EWS terpasang	8	8	100	900	100
	Jumlah kegiatan gladi /simulasikesia	3	3	100	800	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Thn 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
	psiagaan menghadapi ancaman bencana					
	Jumlah rambu Jalur Evakuasi terpasang	150	150	100	533.3	100
	Jumlah kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen bidang kebencanaan	8	11	137.5	600	85.71
	Jumlah peserta/ komunitas PB yang terlibat dalam upaya PRB	150	285	190	100	80

Penyelenggaraan PB pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana telah dilakukan oleh BPBD Prov Jawa Tengah. Sasaran utama dari kegiatan dibidang penanggulangan bencana, antara lain adalah Identifikasi dan informasi potensi bahaya/ ancaman bencana diwujudkan dalam bentuk dokumen dan peta risiko bencana serta mempersiapkan masyarakat agar waspada dan siaga menghadapi ancaman bencana di sekitar tempat tinggal. Data dan informasi bencana merupakan dokumen awal dalam upaya melakukan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat baik. Sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan merangkul para pemangku kepentingan antara lain masyarakat, dunia usaha. Tahapan dan proses pelaksanaan kegiatan disusun secara runtut dan sistematis, antara lain melalui identifikasi, sosialisasi daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur serta upaya

merangkul sektor non pemerintah (dunia usaha) untuk ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah melalui simulasi, gladi dan pembentukan desa tangguh bencana.

Dalam pengembangan Mastana, dilakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan warga untuk dapat mengelola risiko akibat bencana alam atau teknologi yang dapat mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan masyarakat desa, antara lain : pengetahuan tentang kondisi desa secara lebih baik, perkiraan/perhitungan potensi risiko bencana berdasarkan kajian yang melibatkan warga, penyusunan rencana kontijensi terhadap ancaman bencana, penyusunan rencana tindak lanjut dan aksi komunitas untuk mencegah-menangkal-meredam potensi ancaman, ketrampilan teknis bagi relawan-perangkat desa-masyarakat umum dalam penguatan koordinasi, kerjasama untuk menemukan pilihan-pilihan cara penyelesaian masalah kebencanaan yang ada di antara masyarakat desa sasaran secara mandiri. Sasaran akhirnya adalah terbentuknya Desa Berdikari/Mandiri. Sumberdaya pendukung pelaksanaannya dapat berasal dari inisiatif masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD, APBN, lembaga non pemerintah dan lemabaga asing atau swasta. Tahun 2018 terbentuk 8 desa tangguh bencana baru, yaitu

- Pengembangan Mastana di Kabupaten Kudus, dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Desa Desa Menawan Kec Gebog, Kudus
- Pengembangan Mastana di Kabupaten Sragen, dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Maret 2018 di Desa Bukuran Kec Kalijambe Sragen,
- Pengembangan Mastana, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada tanggal 23-27 April 2018 di Desa Cihonje Kec. Gumelar Banyumas,

- Pengembangan Mastana, di Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tanggal 23-27 April 2018 di Desa Desa Maribaya Kec. Kramat Kab Tegal
- Pengembangan Mastana, di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan di Desa Desa Tlaga Kec Punggelan Kab Banjarnegara
- Pengembangan Mastana, di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan Di Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara
- Pengembangan Mastana, di Kabupaten Pemalang dilaksanakan di Desa Bongas Kec. Watukumpul Kab Pemalang

Pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi upaya relokasi kerap kali harus ditempuh, walaupun menghadapi tantangan berat karena adanya resistensi dari aspek sosial-ekonomi-budaya di masyarakat maupun terbatasnya anggaran. Pada kondisi ini, upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi. Mitigasi bencana berupa pemasangan rambu-rambu masih belum banyak dipasang, sehingga ketika bencana tanah bergerak /tanah longsor maupun banjir bandang terjadi, banyak masyarakat yang bingung tentang kemana mereka harus menyelamatkan diri, sehingga yang terjadi kepanikan ditengah-tengah masyarakat saat kejadian bencana. Oleh karena itu, di lokasi yang rentan terhadap bencana di 6 (enam) kabupaten yang dimaksud perlu adanya pemasangan jalur-jalur evakuasi ini disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya. Sehingga apabila terjadi bencana gerakan tanah / tanah longsor dan banjir bandang dapat dihindari ataupun diminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian harta benda.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah salah satu system pendekatan untuk mengindentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal korban manusia, sosial, ekonomi dan juga lingkungan alam serta penyebab pemicu bencana. Pengurangan Risiko

Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah suatu proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kemampuannya. PRBBK merupakan proses internalisasi PRB di tingkat komunitas rentan yang dirancang secara partisipatoris dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lokal, dilakukan untuk membangun pondasi rasa aman yang segala kegiatannya mendorong untuk ketercukupan kebutuhan dasar serta membangun berbagai perangkat dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana.

Hal inilah yang mendasari pentingnya pembelajaran PRBBK khususnya bagi masyarakat komunitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingakan masyarakat non disabilitas dikarekan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal penanggulangan bencana. Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB nomor 14 Tahun 2014, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatas fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Bahkan di pasal 3 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta

mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip persamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. Harapan kedepannya masyarakat penyandang disabilitas yang tinggal di daerah rawan bencana akan merasa pentingnya budaya sadar bencana, sehingga akan tercipta perubahan perilaku dalam menghadapi bencana terlebih pada kondisi kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam pelayanan penyandang disabilitas yang inklusif.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 8.865.000.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.363.280.362,- (83,06%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 1.501.719.638,-. (16.93%)

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain

1) Pengembangan Masyarakat tangguh benana
2) Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat
3) Gladi Manajemen Bencana
4) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi
5) Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
6) Penyusunan Peta Risiko Bencana Prov Jateng
7) Penyusunan Rencana Kontijensi (*Contigency Plan*)
8) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
9) Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (*Disaster Study*)
10) Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

11) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
12) Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana

2. Sasaran strategis 2

Sasaran strategis 2 (Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana) diukur melalui indicator sasaran kinerja Jumlah peserta bintek SAR dan latihan gabungan, Jumlah peserta pelatihan TRC, Jumlah tangki bantuan air bersih

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dukungan kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Sedangkan terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat serta melibatkan peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bersifat komplementer.

Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah/ pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu dilaksanakan Latihan Komando Penanganan Darurat Bencana bagi aparat pemerintah, masyarakat dan lembaga penggiat kebencanaan. Latihan ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan sistem komando Penanganan Darurat Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD kepada instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

BPBD Prov. Jawa Tengah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kepala PDAM setempat perihal permohonan kerjasama untuk memberikan dukungan bantuan air bersih ke wilayah terdampak dimaksud. Penandatanganan Naskah Kerjasama dilakukan antara BPBD Prov. Jawa Tengah dengan PDAM/BPBD Kabupaten/kota setempat pada Bulan September–November 2018, dengan mempertimbangkan percepatan pelaksanaan dan kemudahan akses

Dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan/ kekurangan air bersih di Provinsi Jawa Tengah, BPBD Prov. Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan air bersih dengan kerjasama dengan PDAM kab/kota di Jawa Tengah. Mekanismenya pelaksanaannya adalah dengan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten /Kota dan atau dengan PDAM Kabupaten/Kota. Sebanyak 32

kabupaten/kota berpotensi terjadi bencana angin, banjir dan tanah longsor, dengan rincian rawan banjir: 334 kecamatan dan 1.719 desa/kel serta rawan tanah longsor 335 kecamatan dan 1.594 desa/kelurahan. Hasil kegiatan Fasilitasi Dropping Air Bersih Tahun 2018, bahwa Sesuai dengan alokasi yang diberikan dan kemampuan armada Kabupaten terdampak, maka alokasi jumlah pengiriman air bersih sebagai berikut: 1) Kabupaten Demak sebanyak 100 tanki, Kabupaten Wonogiri sebanyak 100 tanki, Kabupaten Tegal sebanyak 100 tanki, Kabupaten Kendal sebanyak 100 tanki, Kabupaten Cilacap sebanyak 75 tanki dan Kab. Temanggung sebanyak 42 tanki.

Tabel 10
Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Jumlah peserta bintek SAR dan latihan gabungan	200	200	100		
	Jumlah peserta pelatihan TRC	90	90	100		
	Jumlah tangki bantuan air bersih	1000	1.216	121		

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.630.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.372.521.250,- (84,23%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 257.478.750,- (15,79%). Efisiensi anggaran berasal dari efisiensi pengadaan belanja air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Hal ini dipengaruhi oleh factor cuaca yang cepat beralih ke musim penghujan sehingga musim kemarau relative lebih sedikit, selain itu dipengaruhi pula oleh

adanya pemerintah kabupaten/kota telah mengalokasikan dana untuk pemenuhan droping air bersih sehingga permintaan droping ke provinsi lebih sedikit. Dari aspek masyarakat/non pemerintah, adanya media social dan media daring telah membuat banyak peluang sehingga berbagai komunitas masyarakata baik alumni sekolah, profesi maupun hobi ikut melakukan bantuan air bersih langsung ke masyarakat.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain adalah :

1) Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
2) SAR Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sedekah Laut /Sura
3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
4) Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
5) Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana, dengan sasaran indicator yaitu Jumlah peserta pelatihan Dala/ Jitu Pasna dan Jumlah koordinasi dan konsolidasi rehab rekon

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas terkait dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini diisi dengan rapat kecil dan observasi dilapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait

sesuai tugas pokok dan fungsinya, Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui system manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana *(Damage and Losses Assesment/DaLA)* untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pelatihan teknis penilaian penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (Damage and Losses Assessment/DaLA) dan JITU PB melibatkan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Palang Merah Indonesia.

Metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (Damage and Losses Assesment/DaLA) menggunakan metode dari ECLAC (Economic Commission For Latin America And Caribian) yang dikembangkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu instrumen analisis untuk mengukur besarnya dampak bencana di dunia, termasuk di Indonesia dan untuk mengkaji kebutuhan pascabencana (JITU PB) berpedoman pada Peratuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 15 Tahun2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.

Untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna penanganan rekonstruksi pascabencana di wilayah terdampak bencana. Adapun wadah pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi ataupun forum diskusi terfokus (FGD) sebagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi serta konsultansi semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam

rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah, juga merupakan *sharing* pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Dengan demikian terbentuklah suatu pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan penanggulangan bencana bahwa pada tahapan pasca bencana diperlukan usaha bersama untuk pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana.

Tabel 11
Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta pelatihan DALa/ Jitu Pasna	60	60	100		
	Jumlah koordinasi dan konsolidasi rehab rekon	13	13	100		

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.200.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.012.810.840,-. (84,41%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 187,189,160,- (15.59%). Efisiensi keuangan dipengaruhi efisiensi belanja dekorasi/dokumentasi, jasa narasumber, perjalanan dinas.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya program penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kegiatan:

1) Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
2) Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Contigency Plan)

Pada pencapaian sasaran ini, didukung pula oleh pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB terutama untuk kegiatan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir, sehingga dokumen tersebut dapat selesai sesuai target dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Sasaran strategis 4

Sasaran strategis 4, yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran staretegis ini dihitung mendasarkan indicator jumlah kursus/diklat yang diikuti. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 12
Perhitungan Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Jumlah paket logistik untuk masyarakat terdampak bencana	1000	1200	120		
	Jumlah unit peralatan sarana prasarana PB	5	5	100		

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 3,968,173,790,- (97,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4,065,642,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 97,468,210,- (2,39%). Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber dan perserta kegiatan.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan yaitu:

1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
   a) Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia
   b) Pendidikan dan Pelatihan Formal
   c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   d) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
   a) Penyusunan Dokumen Tematik Bidang Kebencanaan

Pada pencapaian sasaran ini, didukung para pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran strategis 5, yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai dari 3 (tiga) indicator kinerja, yaitu dari penambahan jumlah sarana/prasarana, penambahan asset dan pemulihan sarana/prasana terdampak bencana.

Tabel 13
Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah publikasi kebencanaan dan even pengurangan risiko bencana/ pembangunan	153	153			
	Jumlah data kejadian kerusakan/ kerugian bencana	1	1	100	100	100
	Jumlah peserta kursus/diklat teknis dan pendukung PB	300	300	100	100	100
	Jumlah kegiatan koordinasi konsolidasi lintas sekor wilayah para pemangku kepentingan PB	8	8	100	100	100

Mendasarkan data tabel tersebut, maka dukungan dari berbagi pihak sangat membantuk bagi BPBD Prov Jawa Tengah. Rincian capaian sasaran strategis ini sebagai berikut.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 2.551.999.018,- (94,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.715.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 163.000.982,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan

lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Penambahan asset sarana dan prasarana pendukung PB tidak terlepas dari adanya dukungan dari BNPB kepada BPBD Prov Jawa Tengah. APBD Prov Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
3) Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
4) Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
5) Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
6) Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng
7) Sinergitas multisektor pascabencana

Data kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak **2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga)** kejadian bencana, dengan taksiran kerugian akibat bencana mencapai Rp.87.168.095.000,-. Kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana tanah longsor yaitu 927 kejadian atau 44.30%,-. Sedangkan dari aspek kerusakan /kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana kebakaran dengan taksiran sebesar Rp.40.622.373.000,-. Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 14
Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2018

No	Jenis Bencana	2018*		
		Jumlah	**%**	**Kerugian (x 000,-)**
1	2	3	4	5
1	Angin Topan	407	23.12	5.445.666
2	Banjir	171	9.72	2.924.463
3	Tanah Longsor	555	31.53	5.111.986
4	Kekeringan	30	1.70	-
5	Kebakaran	589	33.46	33.866.505

No	Jenis Bencana	2018*		
		Jumlah	**%**	**Kerugian (x 000,-)**
1	2	3	4	5
6	Gempa Bumi	3	0.17	65.000
7	Letusan Gn. Api	5	0.28	
	Total	1.760	**100**	**47.470.095**

* Laporan sampai dengan 31 Desember 2018

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1,025,351,050,- (98,55%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,040,386,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 15,034,950,- (1,45%).

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan, kegiatan yaitu:

1) Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
   a) Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jateng
2) Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
   a) Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana
3) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
   a) Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
   b) Pengembangan sistem peringatan dini bencana tanah Longsor (*Early Warning System*) Berbasis Masyarakat

Mendasarkan tabel masing-masing Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), resumenya adalah sbb.

Tabel 15
Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan,	Jumlah desa tangguh bencana	8	8	100		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah unit EWS terpasang	2	5	250		
	Jumlah kegiatan gladi/simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana	3 3	3	100		
	Jumlah rambu Jalur Evakuasi terpasang	90	90	100		
	Jumlah kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen bidang kebencanaan	8	8	100		
	Jumlah peserta/ komunitas PB yang terlibat dalam upaya PRB	150	150	100		
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Jumlah peserta bintek SAR dan latihan gabungan	250	250	100		
	Jumlah peserta pelatihan TRC	150	150	100		
	Jumlah tangki bantuan air bersih	1000	1000	100		
Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta pelatihan DALa/ Jitu Pasna	60	60	100		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah koordinasi dan konsolidasi rehab rekon	13	13	100		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Jumlah paket logistik untuk masyarakat terdampak bencana	1000	1300	100		
	Jumlah unit peralatan sarana prasarana PB	5	5	100		
Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah publikasi kebencanaan dan even pengurangan risiko bencana/ pembangunan	153	153	100		
	Jumlah data kejadian kerusakan/ kerugian bencana	1	1	100		
	Jumlah peserta kursus/diklat teknis dan pendukung PB	300	300	100		
	Jumlah kegiatan koordinasi konsolidasi lintas sekor wilayah para pemangku kepentingan PB	8	8	100		

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2018 pada BPBD Prov Jawa Tengah secara keseluruhan tercapai sebesar **88,68%,** terdiri dari :

Tabel 16
Realisasi Keuangan APBD TA 2018

No	Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
a	Belanja Tidak Langsung	7.810.538.000	7.439.788.771	95.25	370.749.229
b	Belanja Langsung	29.608.000.000	25.745.104.900	86.95	3.862.895.100
c	Jumlah	37.418.538.000	33.184.893.671	88.68	4.233.644.329

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 48 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar **Rp. 7.439.788.771,- (95,25%)**. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 370.749.229,- (4,75%).** Efisiensi belanja dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan belanja sesuai dengan pegawai di BPBD Prov Jateng.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk 8 (delapan) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan **Rp. 29.608.000.000,-** secara fisik tercapai **94,61 %**, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 25.745.104.900,- (97,61%).** Capaain realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, yaitu pengadaan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit truk toilet. Hal ini disebabkan

a. proses pengadaan truck toilet melalui e-purchasing/e- katalog (LKPP) hanya terdapat 1 (satu) penyedia dan penyedia tersebut tidak sanggup untuk memenuhi barang pesanan s.d 31 Desember 2018.

b. BPBD Prov Jawa Tengah telah berkonsultasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk mencari solusi, dan diberikan opsi antara lain, bahwa dapat dilakukan melalui lelang cepat. Proses lelang cepat belum dapat dilakukan di ULP Prov Jateng karena system yang digunakan di ULP Prov Jawa Tengah belum siap (leleng cepat hanya digunakan pada SPSE versi terbaru/Versi 4, sedangkan SPSE Prov Jawa tengah masih versi 3). Scenario leleang cepat adaah bhawa dalam waktu 3-7 hari sudah dapat pemenang/penyedia, namun sesuai dengan ekalatog bahwa hanya terdapat 1 (satu) penyedia barang/jasa, maka ketika lelang cepat dilaksanakan dan memperoleh pemenang, dikhawatirkan produk tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena penyedia yang terpilih akan mencari produk/unit truck ke penyedia tunggal sesuai di ekatalog sehingga langkah ini tidak jadi dilaksanakan.
c. BPBD masih mempunyai 1 unit truck toilet yang masih operasional dengan berbagai keterbatasan, sehingga meskipun kondisinya terbatas maka karena tidak ada sumberdaya pendukung lain maka kondaraan tersebut tetap dioptimalkan untuk pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaam kendaraan truck toilet TA 2018 tidak jadi dilaksanakan. Kegagalan pelaksanaan kegiatan telah disampaikan kepada Ketua TAPD dan untuk memenuhi kendaraan dimaksud, BPB DProv jwa Tengah meminta untuk dialokasikan kembali pada APBD TA 2019.

Efisiensi anggaran belanja langsung kegiatan antara lain terdapat pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, honorarium narasumber/instruktur, belanja makan dan minum rapat, dan sewa ruang rapat/pertemuan. Efisiensi belanja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
b. Optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

Realisasi keuangan pada belanja program/kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 17
Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2018

No	Realisasi Capaian (%)	Jumlah		Ket
1	2	3		4
1	95.01 – 100	26	Kegiatan	39.39 %
2	90.01 – 95	8	Kegiatan	12.12 %
3	00.00 < 90	32	Kegiatan	48.49 %
	TOTAL	**66**	**Kegiatan**	**100**

Mendasarkan capaian/realisasi keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, dan serapan terendah adalah kegiatan Kegiatan Pembelajaran wawasan kebencanaan. Sasaean dari kegaitan ini adalah untuki uji kompetensi para pemangk kepentingan PB se Jawa Tengah baik dari unsur BPBD maupun relawan yang terlibat dalam PB. Namun dari target 50 orang hanya 10 orang yang dinyatakan lulus sehoingga tingkat penyerapannya kurang dari target. Penyerapan anggaran pada kegiatan ini kurang opotimal pada belanja honorarium asesor/nfasilitator sertifikasi/uji kompetensi.

BAB IV
P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran pad Bab sebelumnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan ketegori Amat Baik. Perhitungan atas Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 76.54% (BAIK).

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Mensikapi tantangan yang dihadapi selema ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegaitan PB, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi.
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan baik

sebagai refreshing peraturan megningat adanya perubahan struktur organisasi BPBD di beberapa Kabupaten/Kota

3. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD dengan peraturan daerah, untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten.
5. Mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan, seperti rencana penyelenggaraan bencana bencana, rencana kontijensi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
6. Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, termasuk upaya antisipasi dan dijadikan sebagai model sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dan bahkan dapat menjadi pedoman atau *Standard Operational Procedure (SOP)* bagi aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana
7. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. DUnia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
8. Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui Diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi /mutasi aparatur sumberdaya PB yang telah terlatih sehingga mempunyai kompetensi yang sama.
9. Mendorong BNPB untuk melakukan sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring kompetensi dan kapasitas

masing-masing aparatur PB melalui Pendidikan dan pelatihan sumberdaya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode

10. Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.
11. Memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain.
12. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov Jateng.
13. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program *Corporate Social Responsibility (CSR*) di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Salam tangguh dan salam kemanusiaan....!